

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan kebudayaan masing-masing, masyarakat-masyarakat setempat dengan kebudayaan-kebudayaan asli mereka sendiri-sendiri itu di Indonesia lebih dikenal suku bangsa, artinya *paroh* atau bagian dari bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di daerah-daerah memiliki sistem kepemimpinan tradisional sendiri yang coraknya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah mereka.

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Pulau Sumatera provinsi ini beribu kota di Palembang. Secara geografis Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara.

Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) pemerintah Kabupaten yaitu kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Lahat, dan 4 (empat) pemerintah Kota yaitu Kota Palembang, Lubuk

Linggau, Prabumulih, dan Pagaram. Kota Pagaram, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan sebagian Kabupaten Muara Enim termasuk wilayah tanah Besemah . Kata besemah berasal dari kata dasar semah, yakni nama jenis ikan, semah ditambah awalan be- 'ber-' yang berarti ada, memiliki, atau mengandung apa yang disebut kata dasar (Kartawinata, 2007).

Tanah Besemah merupakan lembah yang letaknya tinggi di pegunungan Bukit Barisan, terbentang dari laut ke arah Barat Daya, dengan permukaan kurang lebih 45°, 1800 – 2200 kaki diatas permukaan laut, kebanyakan terkurung oleh daerah pegunungan, bumi Besemah terbuka jika dimasuki dari arah Bengkulu, di kaki gunung Dempo terdapat lebih banyak jenis tanaman, sedangkan di lereng-lereng terdapat banyak hutan dan terlihat sawah yang menghijau dan dusun-dusun terlihat cerah diantaranya.

Tanah Besemah adalah daerah sentra pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan, padi, perkebunan, utamanya kopi, teh, dulu pada zaman Belanda pernah dikembangkan kina dan karet, panorama alam puncak gunung Dempo, air terjun dan beberapa peninggalan zaman purba berupa megalit, menhir, dolmen yang berserakan di beberapa dusun di Besemah. Dengan demikian apa yang digambarkan kaum penjajah Belanda adalah benar bahwa rakyat Besemah memiliki kemerdekaannya sendiri, tidak tergantung pada pihak lain dalam membangun tanah Besemah (Suan, Pascal, & Herpansi, 2005).

Menurut T.S.H. Kornawi Yacob zaman dahulu orang-orang yang berasal dari

satu puyang (masih termasuk satu keturunan) hidup berkelompok disuatu tempat tertentu. Kumpulan orang-orang seketurunan atau berbentuk keluarga luas terbatas (*klen patri lineal*) itu disebut suku karena orang-orang yang berasal dari satu suku itu merupakan orang yang seketurunan, maka pada masa itu dilarang untuk melakukan perkawinan antara orang-orang dalam satu *sumbay*. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga satu demi satu suku-suku itu menjadi besar dan juga banyak terjadi pelanggaran perkawinan, maka akhirnya diperbolehkan menikah dalam satu dalam batas-batas tertentu, seperti batasan *icest* dan ketentuan agama islam (Suan, Pascal, & Herpansi, 2005), .

Besemah yang kini telah sejak lama memiliki lembaga adat, lembaga pemerintahan adat, sekaligus merupakan lembaga hukum atau lembaga peradilan dan lembaga perwakilan atau permusyawaratan yang sangat demokratis. Nama lembaga tersebut adalah *lampik Mpat mardike duwe*, kalau dialihbahasakan menjadi “Lampik Mpat Merdeka Dua” namun sebagai istilah hukum, *lampik Mpat mardike duwe* tidak boleh dialih bahasakan, sama halnya dengan istilah *Dalihan Na Tolu* (dalam bahasa Batak) tidak dialih bahasa, cukup diberi keterangan atau penjelasan, atau terangkan maknanya dengan bahasa yang dimengerti oleh umum. *lampik Mpat mardike duwe* merupakan sistem pemerintahan tradisional asli masyarakat besemah sebelum diterapkannya pemerintahan marga oleh pemerintah Kolonial Belanda akhir abadke-19 (Suan, Pascal, & Herpansi, 2005).

Sebagai lembaga tradisional khas suku bangsa Besemah, fungsi-fungsi *lampik*

Mpat mardike duwe adalah sebagai berikut (Suan, Pascal, & Herpansi, 2005):

1. Sebagai lembaga adat
2. Sebagai lembaga permusyawaratan/perwakilan lembaga demokrasi
3. Sebagai lembaga peradilan atau lembaga hokum
4. Sebagai lembaga pemerintahan tradisional atau lembaga tertinggi pada masa Jagat Besemah.

Menurut Ter Haar sebagai lembaga adat, *lampik Mpat mardike duwe* merupakan lembaga yang beranggotakan para pemangku adat yang disebut *Juraytuwe*. *Juraytuwe* ialah keturunan langsung dari pembangun dusun dengan kekuasaannya dalam urusan tanah. (Suan, Pascal, & Herpansi, 2005)

Waktu itu para sesepuh dan tokoh masyarakat Besemah belum mengerti tentang pemekaran daerah, dan memang aturan tentang pemekaran daerah baru diundangkan melalui undang-undang tentang otonomi daerah tahun 1999, sudah dua puluh tahun yang lalu, sangat wajar jika dilakukan evaluasi dan mengikuti tuntutan zaman. Pembentukan kabupaten Besemah tidak lepas dari nilai historis sejak berdirinya provinsi Sumatera Selatan pada pembagian daerah atau wilayah ditetapkan sebagai Kewedanaan Tanah Pasemah dengan ibukota Pagaralam sebagai kelanjutan Onderafdeling Pasemah Landen.

Masyarakat Besemah mempunyai keinginan untuk kembali menyatuhkan wilayah Besemah berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat Jurai Besemah.

Sejarah dan perjalanan panjang para tokoh lintas generasi berjuang untuk mewujudkan Kabupaten Besemah sejak dihapusnya sistem pemerintahan Kewedanaan Tanah Pasemah tahun 1989, pada tahun 2001 ditingkatkan menjadi kota otonom Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaram, pada waktu itu hanya mempertimbangkan aspek pengembangan dan kemajuan pembangunan saja, tidak mempertimbangkan kalau kecamatan Jarai, Tanjung Sakti dan Kota Agung terpisah dengan kota Pagaram, sehingga segala urusan pelayanan publik harus ke Kabupaten Lahat melewati Kota Pagaram (Kartawinata, 2007).

Menurut Ahmad Muzawwir dalam (Kartawinata, 2007), sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya serta pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagai prasyarat utama Tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik dengan memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan rakyatnya. Untuk itu perlu dibentuk daerah otonom baru Kabupaten Besemah diwilayah eks Kewedanaan Tanah Pasemah.

Tujuan penggabungan ini ingin menyatuhkan kembali wilayah eks kewedanaan Tanah Besemah, sepertinya langkah mundur disaat daerah lain berlomba untuk pemekaran, Besemah justru melakukan penggabungan, tidak menambah daerah otonom baru, langka ini merupakan koreksi atas pemilihan masa lalu yang mencerai beraikan wilayah Besemah, koreksi atas undang-undang otonomi daerah, pemekaran dinilai telah menciptakan raja-raja kecil di daerah, menggabungkan Jarai, Tanjung Sakti dan Kota Agung menjadi Kabupaten Besemah dengan ibu kota Pagaram (Kartawinata, 2007).

Manfaat penggabungan ini untuk mengembalikan jati diri, marwah Besemah yang dikenal pemberani, bertanggung jawab, memiliki perhitungan yang matang, melawan. Terpisahnya wilayah Besemah telah mengakibatkan orang Pagaram bukan orang Lahat, orang Jarai, Tanjung Sakti dan Kota Agung tidak diakui sebagai orang Pagaram, dan juga bukan orang Lahat.

Penggabungan ini untuk memudahkan dan memberdayakan Besemah. Kabupatennya nanti Tanah Besemah, ibu kotanya Pagaram. Itu kita marger menjadi besemah. Jadi didalammnya itu akan ada 9 kecamatan yakni Jarai, Sukamerindu, Pajar Bulan, Muarapayang, Tanjung Sakti PUMU, Tanjung Sakti PUMI, Kota Agung, Tanjung Tebat dan Mulak (Yudi Herpansi, 2017).

Keinginan masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Besemah di eks Kewedanaan tanah Pasemah yang mencankup wilayah eks Kecamatan

Pagaralam, sekarang kota Pagaralam 5 kecamatan, eks kecamatan Jarai sekarang 4 kecamatan, eks kecamatan Tanjung Sakti sekarang 2 kecamatan, eks kecamatan Kota Agung sekarang 4 kecamatan, bukan keinginan yang muncul sesaat dan kepentingan perorangan, tapi keinginan yang sudah sejak lama, sejak tahun 1962 dihapusnya sistem pemerintahan Kewedanaan Tanah Pasemah sampai sekarang, sudah 50 tahun lebih.

Menurut Aspan Fikri dalam (Sadam, 2020), terkait rencana awal Tim Presidium untuk melakukan pemekaran EX kewedanaan tanah Pasemah, sudah dibatalkan karena belum dibukanya moratorium pemekaran daerah. Namun hasil konsultasi dengan Direktorat Kemendari ada 1 slot opsi lain, yakni Amalamasi atau penggabungan antara 2 wilayah. Jika disetujui, ini perdana di Indonesia dan Lahat sebagai pionernya audiensi pertama secara lisan Pak Bupati Lahat mengatakan setuju, tapi UU menghendaki SK tertulis.

Namun rencana besar yang dicetuskan Tim Presidium Kabupaten Besemah belum mendapat respon dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam. Walikota Pagaralam Alpian Maskoni saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Laporan Komisi LKPJ Walikota tahun anggaran 2019 di DPRD Pagaralam, lalu menegaskan Pemkot Pagaralam belum memosisikan diri menolak atau menerima rencana tersebut.

Sementara itu Walikota Pagaram Alpian Maskoni menyebutkan dari analisa sementara kami penggabungan ini tidak menguntungkan dari sisi manfaat secara ekonomi maupun sumber daya alam, karena sangat merugikan dan membebani lima kecamatan yang ada. Selain itu Alpian juga menilai apa yang sudah dipaparkan mengenai pendapat presidium sangat kontradiktif satu dengan lainnya antara pengurus Presidium mengenai pendapatnya, kalau berbicara keresidenan maupun kewedanaan jelas Undang-Undang sudah mengapus ini (Sadam, 2020).

Terkait *statement* orang nomor satu di kota Pagaram, Sekretaris Presidium Kabupaten Besemah Arudji Kartawinata meminta agar jangan *apriori* terlebih dahulu teradap rencana ini. Dasar dari rencana pembentukan Kabupaten Besemah karena potensi ekonomi Kota Pagaram selama ini sebagian datang dari daerah penyangga, yakni Jarai area dan Tasti area. Hasil panen masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kebanyakan mengisi pasar tradisional Pagaram (Kartawinata, 2007).

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, jika penggabungan terwujud Kota Pagaram berubah menjadi kabupaten mengenai nama bisa Besemah dan bisa juga Pagaram sesuai usulan nantinya. Jika rencana pembentukan Kabupaten Besemah terwujud maka wilayah Kota Pagaram diperluas sesuai batas kewedanaan dulu, masyarakat pun mendapat manfaat jika penggabungan terjadi. Selain APBD naik dua kali

lipat dari Rp740 miliar menjadi Rp1,5 triliun per tahun, juga Kota Pagaralam akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Manfaat lain menaikkan daya saing daerah secara regional dan nasional menjadi pelopor dan percontohan nasional daerah pertama yang melakukan penggabungan (amalgamasi) di Indonesia, percepatan kesejahteraan rakyat Kota Pagaralam, dan potensi serta peluang wisata, agribisnis, agroindustri, dan investasi terbuka (Kartawinata, 2007).

Jika kota Pagaralam tetap bertahan seperti sekarang ini, maka akan mengalami stagnan dan tidak bisa berkembang karena sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mentok, sebab hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Tim Presidium hanya sebagai alat menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah dan pusat. Dan lagian tim presidium bekerja sesuai peraturan perundangan, arahan gubernur asil konsultasi ke Kemendagri (Kartawinata, 2007).

Sebagaimana diketahui Kabupaten Besemah memiliki wilayah eks Kewedanaan Tanah Besemah, yakni wilayah Kota Pagaralam, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU/PUMI, Kecamatan Mulak Ulu, dan Mulak Sebingkai, Kecamatan Jarai, Sukamerindu, Pajar Bulan, Muara Payang serta kecamatan Kota Agung Lahat. Dimana menurut informasi Tim Presidium telah berkonsultasi dengan Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri dengan mengajukan dua opsi, yakni Kabupaten Besemah dengan

ibukota Pagaralam serta opsi kedua Kabupaten Besemah di luar wilayah Kota Pagaralam.

Namun ajuan tersebut di tunda sementara karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah akan menunda usulan pemekaran 314 daerah setingkat provinsi, kabupaten/kota. Alasannya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.

Rencana pembentukan kabupaten Besemah ini tidak terlepas dari peran dan kepentingan para elit lokal setempat, dimana dibalik rencana pembentukan ini terdapat motif untuk memperluas daerah kota Pagaralam yang awalnya pemerintah kota Pagaralam tidak menyetujui rencana pembentukan ini. Maka perlunya sebuah pemahaman mengenai persoalan antara anggota presidium dengan pemerintah kota Pagaralam dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan masyarakat Besemah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengembalikan masyarakat Besemah baik dari aspek kewilayaan kemasyarakatan, kebudayaan adat istiadat dan keperintahan sebagaimana dahulu terwadahi dalam kewedanaan tanah Besemah, namun rencana pembentukan kabupaten Besemah ini terjadi timbal balik antara anggota presidium dengan pemerintah kota. Hal

inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk memeliti persoalan ini, penulis merumuskan judul “dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rencana pembentukan kabupaten besemah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan bidang politik dan menjadi kajian dalam literatur ilmu politik. Peneliti berharap dapat memberikan wawasan serta kejelasan mengenai “dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah”

tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini untuk mengetahui dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rencana pembentukan kabupaten Besemah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Dalam Jurnal Ilmu Politik tahun 2019 yang berjudul “Dinamika Politik Lokal Dalam Rekrutmen di Tingkat Lokal: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Malang” oleh Serly Nur Nafisah dari penelitian ini penulis menjelaskan bawasanya dinamika politik lokal yang terjadi saat ini di Kabupaten Malang terfokus kepada fenomena rekrutmen partai-partai politik. Dimana keistimewaan dalam proses fungsi rekrutmen tersebut terletak pada salah satu sosok yaitu Sucipto selaku pengusaha lokal sukses yang menjadi rebutan beberapa partai, terutama empat partai politik yaitu PDI-P, Golkar, PKB, dan Gerindra untuk dapat direkrut. Setiap partai politik tersebut memiliki persepektif atau pandangan dalam melihat sosok Sucipto, dimulai dari pandangan secara luas dan secara personil.

Dimana terdapat dua alasan utama yang membuat Sucipto menjadi rebutan yaitu karena latar belakangnya sebagai pengusaha dan kedua karena Sucipto dikenal di masyarakat sebagai sosok elite atau tokoh. Selanjutnya, daya tarik

pengusaha memang sangat kuat di depan mata partai politik. Alasan keempat partai politik tersebut lebih tertarik merekrut sosok pengusaha dalam melaksanakan fungsi rekrutmennya karena menurut mereka mampu dan layak untuk direkrut jika dilihat dari berbagai sisi. Namun dua sisi utama yang dilihat oleh partai yaitu sisi finansial dan sisi jaringan massanya. Meskipun banyak partai politik yang mencoba merayu dan mendekati agar dapat merekrut Sucipto, dirinya tetap pada satu pilihan yang dikehendaki yakni tetap berada pada posisi netral atau tidak berpihak ke partai manapun.

Adapun penelitian Ariandi A Zulkarnain (2014) bidang sosial dan politik dengan judul “dinamika proses pemekaran Kecamatan Senjato Raya Kabupaten Kuantan Singingi” dalam Jurnal Ilmu Politik ini menyimpulkan dalam dinamika dan pembentukan suatu Kecamatan merupakan wujud otonomi daerah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ditingkat daerah maupun pusat yang bertumpu pada peraturan yang ada dan dalam proses pembangunan suatu bangsa harus selaras dengan proses demokrasi. Melihat pada prosesnya pemekaran Kecamatan Sentajo Raya terdapat politik kepentingan elit didalamnya.

Adapun penelitian Eka Andriani (2007) dengan judul “dampak pemekaran daerah Kecamatan terhadap pelayanan publik (studi di Kecamatan Pasanggrahan Kabupaten Banyuwangi)” dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan ini menyimpulkan bahwa dampak pemekaran Kecamatan Pasanggrahan Kabupaten Banyuwangi terhadap pelayanan publik yang berkualitas tentu ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kecamatan Pesangaran dan Kecamatan Siliragung dalam

meningkatkan pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan publik dalam masyarakat.

Namun demikian masyarakat masih merasa belum maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut pemerintah kecamatan diharapkan mampu mengatasi kekurangan yang ada guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan maksimal. Dan masyarakat sebagai obyek pelayanan publik diharapkan dapat menyadari dan melaksanakan prosedur atau tata cara pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Jurnal Ilmu Politik dari Kusandandajani, M.S. yang berjudul “ analisis dinamika politik di balik tuntutan pemekaran Cilacap Barat” disini dijelaskan proses rencana pemekaran Cilacap Barat telah menciptakan dinamika kekuatan politik tertentu di Kabupaten Cilacap. Dinamika tersebut terlihat ketika terdapat banyaknya perbedaan pandangan dan konsep tentang pemekaran Cilacap Barat. Salah satu contohnya perbedaan pandangan antara PWCB dan LKCB tentang jumlah kecamatan yang bakal dimekarkan dan letak calon pusat pemerintahan Cilacap Barat. Walaupun saat ini sudah mencapai kesepakatan namun keduanya saat itu kuku untuk memenangkan suaranya dengan dasar asumsi masing-masing pihak.

Setelah diteliti ternyata organisasi tersebut kemungkinan besar berafiliasi pada partai politik penguasa di Kabupaten Cilacap yaitu PDI-Perjuangan dan Golkar. Kedua partai tersebut tentu saja berperan aktif dalam rencana pemekaran Cilacap Barat dikarenakan memang sebagian besar wilayah kecamatan Cilacap bagian

barat merupakan lumbung suara dua partai penguasa tersebut. Kekuatan politik yang berperan dalam rencana pemekaran Cilacap Barat terdiri dari para aktor politik yang ikut bergabung ataupun berafiliasi dengan partai politik penguasa di Kabupaten Cilacap.

Terakhir jurnal dari Muhammad Usman yang berjudul “ dinamika demokrasi lokal dalam budaya rukun partai politik pada pilbup Lamongan 2015” dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan disini dijelaskan dalam sistem politik yang demokrasi untuk memiliki kekuasaan politik harus didapatkan melalui mekanisme pemilihan umum untuk dapat berlangsungnya kehidupan politik yang demokratis. Dalam hal ini sistem politik memiliki peran yang sangat besar dimana partai politik menjadi salah satu aktor utama dibalik penyelenggaraan pemilihan umum baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Penerapan sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara menjadi dasar dilaksanakannya partisipasi politik oleh masyarakat. Partisipasi politik ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemberian suara dan lainnya terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan para pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang meningkat.

Banyaknya partisipasi masyarakat dalam kehidupan yang demokratis merupakan hal yang lebih baik dibandingkan kurangnya partisipasi masyarakat.

Hal ini dikarenakan semakin tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

F. Kerangka Teori

Teori politik lokal oleh Clarence Stone

Teori menjadi sangat penting dalam suatu penelitian, adanya teori membuat suatu masalah menjadi mudah untuk dianalisis berdasarkan teori tersebut. Untuk mengkaji mengenai dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah, peneliti menggunakan teori politik lokal paguyuban yang dikemukakan oleh Clarence Stone (1993).

Politik di tingkat lokal bukan hanya berurusan pada soal-soal administrasi publik atau menekankan pada hubungan legal formal pemerintahan sementara. Meskipun memiliki keterkaitan namun pandangan legal formal seperti itu memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memahami politik lokal secara lebih utuh. Politik lokal mencakup soal yang luas misalnya aspek ekonomi, politik, dan sosial. Karakteristiknya relatif terbuka, beragam, dan kompetitif (Usman, 2003).

Teori yang digunakan sebagai pendekatan analisis untuk studi ini adalah politik lokal yang memberikan perhatian pada perspektif mikro yaitu pemahaman perilaku (*behaviour*) elit lokal ketika melaksanakan wewenang otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat realitas, implementasi politik lokal lebih

banyak diwarnai oleh tawar menawar (*bargaining*) dari koalisi antara elit lokal dan aktor-aktor tertentu didalam masyarakat. Kekuasaan pemerintahan lokal dilakukan lebih untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan publik, individu, dan kelompok dengan kemampuan pemerintah lokal dalam mengakomodasi tuntutan tersebut (Stone, 2015).

Politik lokal yang menguraikan tentang kerumitan hubungan antara kepentingan dan kebijakan adalah pendekatan regim kota (*urban regime*) sebagai “*The informal arrangements by which public bodies and private interest function together in order to be able to make and carry out governing decisions*”. (pengaturan informal dimana kepentingan badan-badan publik dan swasta berfungsi bersama untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah) (Nadir Sakinah, 2016).

Konsep regim kota bermula dari sebuah model produksi sosial dari tata kelola pemerintahan kota, yaitu pekerjaan yang bukan berasal dari kontrol dan perlawanan, tetapi hasil dari satu keuntungan dan peleburan yang didasari atas kapasitas untuk bertindak. Regim kota merupakan hasil dari usaha-usaha yang terkoordinasi, kesepakatan yang dihasilkan adalah buah dari kesepakatan yang tidak terucapkan (secara diam-diam) antara kepentingan publik dan kepentingan swasta tentang bagaimana keputusan akan dilaksanakan. Dalam kenyataannya formasi regim kota membutuhkan pengelolaan konflik dan percintaan respon yang adaptif dalam perubahan sosial. Karena itu, faktor kuncinya adalah pengelolaan internal politik tentang bangunan koalisi antara sektor publik dan swasta (Stone,

2015).

Kaitan teori politik lokal ini dengan masalah yang akan peneliti angkat yaitu ingin mengetahui dinamika politik di dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah dengan mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan memfungsikan peran-peran yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi tersebut. Dalam konteks ini maka institusi-institusi politik lokal adalah dapat dikategorikan menjadi supra struktur politik dan infra struktur politik. Supra struktur politik yang dimaksud adalah pemerintah kota dan infra struktur politik adalah anggota presidium pembentukan kabupaten Besemah.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif explore atau mencari tahu. Bogdan dan Taylor (1992) mendefinisikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu

kondisi, dan sebagainya. Jadi peneliti akan memberikan gambaran mengenai kemudian kualitatif dari gambaran tersebut dalam uraian kalimat-kalimat.

2. Data dan sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap sumber-sumber data yang berkompeten dalam permasalahan yang diteliti dan dokumen-dokumen yang berisi data-data mengenai persoalan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber pertama narasumber yang berasal dari anggota presidum pembentukan kabupaten besemah dan pemerintah kota Pagaralam. Pemilihan para narasumber ini dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa para narasumber tersebut memahami dan mampu memberikan jawaban mengenai permasalahan penelitian. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berisi tentang rencana pembentukan kabupaten besemah yaitu dari buku Presidium Kabupaten Besemah, draft naskah kajian akademik dan usul penggabungan eks kewedanaan tanah Pasemah menjadi kabupaten Besemah ibukota Pagaralam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi

a. Metode Wawancara

Metode wawancara ialah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan panduan wawancara. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai ketua presidium pembentukan kabupaten dan pemerintah kota Pagaram dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten Besemah.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumentasi mengenai pembentukan kabupaten Besemah yang didapat dari buku Presidium Kabupaten Besemah, draft naskah kajian akademik dan usul penggabungan eks kewedanaan tanah Pasemah menjadi kabupaten Besemah ibukota Pagaram.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pagaram

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh untuk menganalisa, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa data. Dalam analisis data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah yang kemudian akan dianalisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil dari penelitian. Tahapan-tahapannya adalah:

a. Reduksi Data

Tahapan reduksi data ini adalah menggolongkan data yang telah terkumpul dalam golongan besar data yaitu data yang didapat dari narasumber dan data yang didapat dari dokumen, Selanjutnya peneliti melakukan pemilahan terhadap kedua golongan data tersebut. Berdasarkan narasumber-narasumber dan berdasarkan dokumen-dokumen.

b. Penyajian Data

Tahap kedua yaitu penyajian data, penyajian data merupakan kegiatan terpenting kedua dalam penelitian ini. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2002:340).

Proses penyajian data ini adalah peneliti menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam susunan-susunan sesuai golongan data.

c. Analisis Data

Analisis data yaitu cara untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan dapat digunakan untuk meghasilkan sebuah kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisa terhadap keseluruhan data yang telah disajikan dengan menggunakan teori politik lokal.

d. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisa data. Dalam

penelitian ini peneliti akan menyimpulkan bagaimanakah “dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah itu”.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, maka peneliti membaginya dalam IV Bab dan beberapa sub Bab. Untuk itu sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I latar belakang

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan laporan, serta daftar pustaka. Bab ini menjadi acuan dalam pembuatan skripsi yang berjudul “dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah”.

Bab II Kajian Kepustakaan yang Relevan

Pada Bab ini peneliti secara khusus menyajikan kepustakaan yang membahas pembentukan daerah-daerah baru, dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah Berbeda dengan kerangkang teori di Bab I, pada Bab ini peneliti akan fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis.

Bab III Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah EKS kewedaaan tanah besemah yang sekarang sudah menjadi kota Pagaralam, Kabupaten Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini peneliti akan menampilkan hasil-hasil dari penelitian dan melakukan anaisa terhadap data-data yag diperoleh. Bab ini berisikan tentang konsep praktik dinamika politik dalam rencana pembentukan kabupaten besemah

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan peneliti mengajukan saran terhadap berbagai pihak terkait rencana pembentukan kabupaten besemah.